

SOAL MIRAS MEREK 'KALIURANG'

Dewan Dukung Penuh Langkah Eksekutif

SLEMAN (KR) - DPRD Sleman mendukung penuh langkah eksekutif untuk menolak penggunaan nama 'Kaliurang' sebagai merk produk minuman beralkohol. Penggunaan nama itu dikhawatirkan akan mencoreng Kaliurang yang merupakan kawasan wisata di Kabupaten Sleman.

Anggota DPRD Sleman Banudoyo Manggolo SKom mengatakan, Kaliurang selama ini menjadi tempat wisata unggulan di Kabupaten Sleman. Jika nama Kaliurang digunakan sebagai merk produk minuman beralkohol, tentu akan berdampak negatif terhadap dunia pariwisata di Kabupaten Sleman.

"Kami sangat keberatan dengan penggunaan 'Kaliurang' untuk merk minuman keras. Dewan sepakat dan mendukung langkah Bupati Sleman yang menolak penggunaan nama 'Kaliurang' sebagai merk produk minuman beralkohol," tegas anggota dewan dari Dapil Pakem, Cangkring dan Ngaglik ini.

Di samping merusak citra pariwisata di Kabupaten

Sleman, lanjut Banudoyo, penggunaan nama Kaliurang juga akan berdampak dengan nama baik masyarakat Kaliurang. Hal itu dikarenakan minuman beralkohol berkonotasi dengan hal-hal negatif. "Kami sudah banyak mendapat laporan dari masyarakat mengenai penolakan penggunaan nama 'Kaliurang' sebagai merk minuman keras. Karena citra masyarakat Kaliurang nantinya bisa negatif," ujar politisi Golkar ini.

Menurutnya, pemerintah serta pihak-pihak terkait harus segera bergerak cepat menyikapi permasalahan ini. Jika tidak, dikha-



Bupati Sleman dan Kakanwil Kemenkum DIY merespons cepat keberatan soal merek 'Kaliurang'.

watirkan akan terjadi kegaduhan di masyarakat. "Semua pihak harus segera bergerak cepat. Hal ini untuk menjaga kondusivitas di masyarakat, khususnya di wilayah Kaliurang," pinta-

saan substantif. Dalam tahap ini, Pemeriksa Merek akan menilai apakah sesuai aturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya Pasal 20 dan 21. "Akan dinilai apakah pendaftaran tersebut bertentangan dengan nilai moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Melalui sistem yang kami miliki, kami melihat merek tersebut didaftarkan PT Perindustrian Bapak Djenggot melalui Konsultan Kekayaan Intelektual di Jakarta," ujar Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung Rektono Seto kepada wartawan, Selasa (22/4).

Ditegaskan, Kanwil Kemenkum DIY sangat memahami kekhawatiran yang disampaikan Pemkab Sleman serta masyarakat luas, terutama menyangkut penggunaan nama geografis yang memiliki nilai kultural dan identitas lokal yang kuat. "Kami ingin masyarakat tahu, bahwa sistem hukum di Indonesia menyediakan mekanisme keberatan dan pembatalan atas pendaftaran merek yang dianggap merugikan pihak lain. Proses ini sepenuhnya terbuka, transparan, dan bertujuan menjamin keadilan bagi semua pihak," tegasnya.

(Sni/Vin) -f

SYAWALAN PWI SLEMAN Wabup Akui Rajin Baca Berita



Wabup Danang Maharsa bersama jajaran PWI Sleman dan pejabat GMS Grup.

SLEMAN (KR) - Wakil Bupati (Wabup) Sleman Danang Maharsa menyebut hingga saat ini antara Pemkab Sleman dengan insan media, termasuk PWI Sleman masih terjalin komunikasi dan kerja sama dengan baik. Mengingat berita merupakan sarana untuk melihat dunia, sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan, pemberitaan dapat menjadi salah satu acuan demi kelancaran pembangunan.

"Saya sebagai Wakil Bupati Sleman tidak mungkin turun ke semua lini. Maka, saya harus membaca juga berita untuk menyelesaikan dan menindaklanjuti berbagai persoalan untuk pembangunan ke depan" ujar Danang saat menghadiri Syawalan yang diadakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sleman di Lavender Lounge The Rich Hotel, Selasa (22/4).

Agenda ini digelar kerja sama PT Garuda Mitra Sejati (GMS) grup yakni The Rich Hotel, Jogja City Mall dan Sleman City Hall. Hadir pula General Manager (GM) Jogja City Mall Beny Sastrawijaya, GM The Rich Hotel R Terra Benrik Putra, Setwan DPRD Sleman, Diskominfo dan Prokomopin Sleman.

Sementara Ketua PWI Sleman Wisnu Wardhana mengucapkan terima kasih kepada PT GMS yang telah memfasilitasi Syawalan yang digelar PWI Sleman. Kerja sama ini diharapkan dapat terus terjalin lebih baik. "Syawalan kerja sama PT GMS ini merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya, acara yang sama juga kita laksanakan di sini," katanya.

(Has)-f

MENGABDI UNTUK UMAT, DILINDUNGI NEGARA BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan untuk Rais Sriharjo

BANTUL (KR)- BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan Jaminan Kematian (JKM) senilai Rp 42.000.000, kepada ahli waris almarhum Syahroni, Rais atau kaum di Kalurahan Sriharjo Imogiri Bantul. Hal tersebut sebagai wujud perlindungan atas dedikasi Alm selama ini. Syahroni dikenal sebagai teladan dan pemimpin spiritual yang senantiasa hadir di tengah masyarakat. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bantul, Albertus Wahyudi, meng-

atakan, pihaknya menyampaikan duka cita mendalam sekaligus penghargaan atas peran strategis para tokoh masyarakat seperti almarhum.

"BPJS Ketenagakerjaan hadir untuk melindungi seluruh pekerja, termasuk mereka yang mengabdikan bagi masyarakat, seperti rais dan tokoh keagamaan di desa. Santunan ini adalah bentuk nyata kepedulian negara agar pengabdian mereka tidak hanya dihargai semasa hidup, tetapi juga tetap bermakna bagi keluarga yang ditinggalkan," ujarnya.

Dalam acara itu juga dihadiri Penewu Imogiri, Slamet Santoso SIP MM. Sebagaimana diketahui, rais atau dikenal sebagai kaum atau modin, memegang peran sentral da-

lam kehidupan keagamaan masyarakat. Mereka adalah penjaga nilai, pemimpin spiritual, dan simbol keteladanan yang terus menghidupkan semangat kebersamaan dan ketenteraman dalam kehidupan beragama dan sosial masyarakat desa.

Lurah Kalurahan Sriharjo Imogiri Titik Istiyawaton Khasanah, S.I.P punya komitmen memberikan perlindungan serupa kepada Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK) lainnya. "Kami menyadari pentingnya perlindungan sosial bagi para pengabdian masyarakat. Ke depan, seluruh unsur Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK) akan kami ikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Ini bukan hanya soal perlindungan, tetapi juga bentuk penghormatan atas dedikasi mereka men-

jaga harmoni sosial dan keagamaan," ujarnya.

Langkah ini diharapkan menjadi inspirasi bagi kalurahan lainnya di Kabupaten Bantul untuk meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagi perangkat desa, tokoh masyarakat, dan para pekerja sektor informal yang selama ini belum terjangkau perlindungan secara optimal.

Sementara Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta, Rudi Susanto, menambahkan bahwa santunan ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dan juga bagian dari komitmen berkelanjutan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjangkau pekerja dari seluruh lapisan masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat seperti rais merupakan pilar kehidupan sosial.

(Roy)-f



Lurah Kalurahan Sriharjo Imogiri Titik Istiyawaton Khasanah (kiri) simbolis menyerahkan santunan.

GOW PERINGATI HARI KARTINI Wujudkan Generasi Unggul dan Berkualitas



Suasana peringatan Hari Kartini di Parasamya Bantul.

BANTUL (KR)-.Peningkatan kualitas diri bagi kaum wanita bukanlah sekadar tuntutan emansipasi, melainkan sebuah keniscayaan dalam mewujudkan generasi penerus yang unggul dan berkualitas. Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Bantul, Aris Suharyanta SSos MM dalam sambutannya pada peringatan Hari Kartini 2025 yang digelar oleh GOW (Gabungan Organisasi Wanita) Kabupaten Bantul di Pendapa Parasamya Komplek Kantor Bupati Bantul, Senin (21/4).

"Kepada para ibu, para wanita hebat Kabupaten Bantul teruslah bersemangat dalam meningkatkan kualitas diri. Jadilah Kartini- Kartini masa kini yang cerdas, mandiri, berakhlak mulia dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan keluarga, masyarakat dan bangsa," harap Wakil Bupati Bantul.

Dikatakan, dengan peringatan Hari Kartini ini, semangat Kartini kembali membakar dalam jiwa kita. Semangat keberanian, kecerdasan dan kegigihan Kartini dalam memperjuangkan hak-hak kaum wanita, khususnya di bidang pendidikan telah membuka jalan bagi kemajuan perempuan Indonesia hingga saat ini.

Sementara Ketua GOW Bantul, Drs Titik Pratiwi Riyantono mengajak semua anggota GOW Bantul, dengan peringatan Hari Kartini ini agar senantiasa meningkatkan kualitas diri agar bisa mendidik anak-anak menjadi generasi penerus yang unggul dan berkualitas, cerdas berakhlak mulia.

(Jdm)-f

DPRD KABUPATEN SLEMAN

SUARA WAKIL RAKYAT

Jl. Parasamya, Tridadi, Sleman, DIY Kode Pos 55511. Telp.(0274)868413, Fax (0274)868413

KOMISI B DPRD KABUPATEN SLEMAN

Perlu Kebijakan untuk Lindungi UMKM Lokal



Syukron Arif Muttaqin SE MAP

SLEMAN (KR) - Dengan adanya kebijakan pemerintah yang melonggarkan impor, pemerintah daerah perlu membuat kebijakan untuk melindungi produk UMKM lokal. Jika tidak ada perlindungan, dikhawatirkan produk UMKM lokal akan kalah dengan produk impor dari luar negeri.

Anggota Komisi B DPRD Sleman Syukron Arif Mutta-

qin SE MAP menuturkan, membuka kran impor ini tentu akan berdampak bagi pelaku UMKM lokal. Hal itu dikarenakan produk dari luar negeri akan membanjiri pasar dalam negeri. "Secara tak langsung, produk dalam negeri akan semakin sempit pasarnya. Belum lagi akan bersaing dari segi harga," katanya.

Untuk itu perlu ada kebijakan pemerintah daerah dalam melindungi produk UMKM lokal. Di antaranya mengencangkan menggunakan produk lokal atau bangga dengan produk lokal. Kemudian setiap investor yang akan mendirikan usaha di Sleman, wajib menggunakan produk lokal, bahan lokal dan tenaga lokal.

"Saya kira policy itu cukup penting untuk melindungi pelaku UMKM. Misalnya kebutuhan makanan di hotel atau restoran harus dari pedagang lokal. Toko-toko

modern wajib memasarkan produk UMKM lokal," tegas politisi dari Fraksi PKB ini.

Di samping itu, penguatan skill bagi pelaku UMKM juga diperkuat kembali. Di antaranya memperkuat pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha lokal. Dengan harapan kualitas produk UMKM lokal tak kalah dengan produk impor.

"Program-program pelatihan dan pendampingan pelaku UMKM perlu ditambah. Supaya skill para pelaku UMKM terus diasah dan dikembangkan. Jangan sampai diberikan pelatihan hanya sekali saja. Tapi kalau bisa terus berlanjut, mereka mampu bersaing dan bisa naik kelas," tambah Warga Mlangi, Nogo-

tirto Gamping ini. Hal senada disampaikan Sekretaris Komisi B DPRD Sleman Timbul Saptowo ST. Menurutnya, dengan memperbanyak program pelatihan dan pendampingan itu sebagai salah satu memperkuat dan melindungi pelaku UMKM lokal. Dengan bekal ketrampilan yang dimiliki pelaku UMKM

itu, diharapkan mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya.

"Yang dibutuhkan para pelaku usaha lokal itu aksi nyata dari pemerintah daerah. Salah satu yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah yaitu pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM itu sendiri. Tanpa memiliki keterampilan, mereka akan sulit bersaing," kata Timbul.

Dalam memberikan pelatihan dan pendampingan itu, lanjut Timbul, tidak hanya UMKM yang baru merintis saja. Namun pelaku UMKM yang sudah jalan juga perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan dari pemerintah. "Jadi semua kelas UMKM disasar, baik dari pemula maupun yang sudah berkembang. Harapannya mereka terus maju dan mampu naik kelas," terang politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini. Kenapa itu penting di-



Komisi B DPRD Kabupaten Sleman saat rapat dengan eksekutif.



Timbul Saptowo ST.

lakukan, karena pelaku UMKM ini merupakan salah satu penyangga ekonomi. Bahkan pelaku UMKM ini sudah teruji tahan banting disaat ekonomi global sedang terjadi krisis. "Mereka (UMKM) tahan banting saat terjadi krisis ekonomi. Dengan ekonomi saat ini yang kurang stabil, penguatan UMKM wajib terus dilakukan," pinta Timbul.

(Sni)-f